

## STRATEGI KEUANGAN BURUH SEKTOR FORMAL PENDEKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA

Nungki Pradita\*<sup>1</sup>  
Gatot Sasongko<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank, Indonesia  
<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah strategi buruh dalam pemenuhan kebutuhannya jika upah yang diterimanya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian dilakukan di Kota Salatiga. Pengambilan data dan pengamatan informan dilakukan dengan cara *indept-interview* serta dilakukan pengamatan selama 3 bulan. Salatiga dipilih karena mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh sektor formal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan upah buruh sektor formal masih dibawah pemenuhan komponen kebutuhan hidup layak yang seharusnya. Terdapat perbedaan pemenuhan kebutuhan antara buruh pada posisi lajang dan buruh pada posisi berkeluarga, sehingga terlihat tidak *fair*. Karena dalam penetapan upah melalui KHL hanya mencakup kebutuhan hidup per satuan individu buruh lajang. Sebaiknya dalam pemberian upah bisa dilakukan dengan cara menambahkan beberapa komponen yang dirasa perlu bagi buruh yang sudah berkeluarga.

**Kata Kunci:** Buruh; Komponen hidup layak; Strategi keuangan

### Abstract

*This study aims to see how the workers' strategies are in fulfilling their needs if the wages they receive are smaller than the expenses they have to pay. The research method used a quantitative approach, where the research was conducted in the City of Salatiga. Data collection and observations of informants were carried out by indept-interview and observation for 3 months. Salatiga was chosen because the majority of the population work as formal sector laborers. The results of the study show that the wage acceptance of formal sector workers is still below the fulfillment of the components of the proper necessities of life. There are differences in the fulfillment of needs between workers in a single position and workers in a family position, so that it looks unfair. This is because the determination of wages through the KHL only covers the necessities of life per individual unit of single laborers. It is better if the wage distribution can be done by adding several components that are deemed necessary for workers who are married.*

**Keyword:** Labor; Decent Living Components; Financial Strategy

**Article History:** Received: (19-01-2021); Revised: (03-03-2021); and Published: (30-04-2021)

**Copyright © 2021 Nungki Pradita, Gatot Sasongko**

**How to cite this article:** Pradita, N., dan Sasongko, G. (2021). Strategi Buruh Sektor Formal Pendekatan Ekonomi Rumah Tangga. *Managemant Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*. 16(1), 127-140

Retrieved from: <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/Insight>

## PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai upah minimum buruh terus terjadi disetiap tahunnya (Margenia dan Chenic, 2013), bahkan hal ini seolah menjadi rutinitas tahunan antara kaum buruh dan kaum pengusaha. Dan bukan pembicaraan yang baru pula jika terjadi tarik ulur mengenai penetapan upah antara pihak yang bersangkutan (buruh dan pengusaha). Walaupun dalam penelitian Chengiz dkk pada 2019 kenaikan upah yang terjadi di Negara Amerika tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh dan juga tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Bagi para pengusaha mempertahankan usahanya tetap berlanjut dan dapat menikmati keuntungan dari produksi adalah hal yang utama namun di lain pihak buruh harus juga mendapatkan haknya sesuai dengan kelayakan hidup, tidak hanya cukup bagi dirinya sendiri namun juga cukup bagi keluarga paling tidak keluarga inti. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti, telah ada jaminan dari negara kepada buruh untuk bisa hidup layak atau sejahtera. Menindaklanjuti amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945, pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berbicara mengenai upah sektor formal tidak akan lepas dari yang disebut upah minimum. Dalam penentuan upah minimum tidak dilakukan secara asal-asalan namun berlandaskan pada standar kebutuhan hidup layak buruh, yang disebut sebagai komponen kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kebutuhan hidup layak menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 13 tahun 2012 terdiri dari tujuh komponen dengan 60 jenis kebutuhan. Survey KHL dilakukan tiap-tiap daerah kabupaten dalam kurun waktu sebulan sekali. Kelemahannya dari penetapan upah minimum hanya dihitung berdasarkan KHL tiap-tiap buruh lajang yang masa kerjanya masih dibawah satu tahun. Perhitungan KHL belum memperhitungkan mereka yang sudah berkeluarga dan atau bekerja lebih dari satu tahun. Di Indonesia buruh menanggung kebutuhan hidup selain dirinya sendiri adalah fenomena yang wajar. Menurut Indrasati & Rina (2009) terdapat 59% buruh lajang memiliki tanggungan selain dirinya sendiri bahkan terdapat 30% buruh yang menanggung lebih dari empat orang termasuk dirinya. Hal ini yang menjadi pemicu rendahnya kesejahteraan ekonomi rumah tangga buruh. Sehingga perhitungan penetapan upah minimum ini menggelitik niat untuk meneliti. Jika KHL hanya menghitung kebutuhan perindividu buruh lantas bagaimana dengan Ekonomi Rumah Tangga Buruh. Bagaimanakah strategi buruh yang sudah berkeluarga dalam memenuhi kebutuhannya.

Upah minimum belum mampu mencukupi kebutuhan buruh yang minimal komponen KHL per buruh lajang. Menurut Maimun Sholeh, (2007) penetapan upah minimum tidak memiliki target yang jelas dalam pengurangan kemiskinan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa penetapan upah minimum selalu dibawah pengeluaran pemenuhan komponen KHL. Secara umum masih banyak lagi kebutuhan lain yang harus dipenuhi buruh di luar kompenen KHL, misalnya saja kebutuhan akan

telekomunikasi, sosial dan televisi. Kondisi saat ini upah minimum yang ditetapkan pemerintah hanya sebagai jaring pengaman (Michele Agustine & I Gusti Ketut Ariawan 2013) agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan upah pada batas upah minimum. Menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah secara normatif penetapan KHL yang dipergunakan sebagai dasar penetapan upah minimum sesuai dengan kenyataan. Secara sistem setiap tahun upah nominal setiap tahun mengalami peningkatan (Sulistiawati, Rini., 2012), namun kemampuan upah rill dibelanjakan mengalami penurunan. Penetapan upah minimum baru untuk tahun yang akan datang, ditetapkan sekitar bulan Oktober-Nopember tahun sebelumnya. Dengan adanya inflasi penetapan upah minimum baru cenderung mengalami penurunan secara kualitas dan kuantitasnya.

Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak dapat mempertinggi produktivitas kerja (Jamal, Sulaiman, & Fitriyani, 2020). Hal ini mengoda peneliti untuk mengetahui seperti apa kesejahteraan buruh pabrik di kota Salatiga. Kesejahteraan buruh sangat erat hubungannya dengan upah yang diterima. Dengan upah yang diterima dapat meningkatkan kesejahteraan buruh maka produktivitas buruh pun juga akan meningkat. Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa upah yang diterima buruh berada dibawah KHL yang berlaku. Sehingga selanjutnya timbul pertanyaan bagaimanakah strategi buruh dalam mengelola penerimaan upahnya supaya dapat mendekati kesejahteraan.

Setiap kenaikan upah maka akan berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang searah artinya setiap penyerapan tenaga kerja meningkat maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulistyawati, 2012). Sehingga secara makro yang dapat dilakukan adalah menjaga stabilitas upah supaya tidak terjadi pengurangan tenaga kerja. Namun bagi buruh yang menerima upah dibawah kebutuhan diharuskan memiliki strategi khusus, supaya tetap bekerja dan tetap menerima upah. Berbekal dari ini maka menurut peneliti perlu adanya melakukan penelitian mengenai strategi nafkah buruh pabrik.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan ekonomi buruh selanjutnya mengetahui strategi nafkah yang digunakan buruh sektor formal di kota Salatiga melalui sistem upah yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi rumah tangga buruh baik berdasarkan perbedaan *gender* dan tempat tinggalnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah dengan upah yang diterima buruh sektor formal sudah dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga buruh. Selanjutnya dalam penelitian ini juga berusaha menjawab bagaimanakah strategi buruh dalam pemenuhan kebutuhannya jika upah yang diterimanya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkannya. Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan

minat untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Keuangan Buruh Sektor Formal Pendekatan Ekonomi Rumah Tangga Studi Kasus Buruh Pabrik di Kota Salatiga”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Upah

Upah memegang peran yang amat penting dalam pembinaan hubungan kerja. Upah adalah salah satu perantara yang digunakan buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Maka dalam penetapan upah pemerintah juga harus turut campur. Campur tangan pemerintah dilakukan untuk menghindari adanya monopsoni dalam pasar tenaga kerja. Jika terjadi monopsoni maka upah yang diterima buruh akan lebih rendah dari kondisi pasar persaingan sempurna sehingga akan mengurangi kesejahteraan buruh.

Berdasarkan UU No 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan Pasal 1 ayat 30, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hal itu didukung oleh pasal 88 ayat 1 UU ketenagakerjaan yang menyatakan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

Upah yang dibayar oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga kerja yang dikorbankan oleh buruh untuk melakukan kepentingan produksi, sehubungan dengan itu maka upah yang diterima oleh buruh dibedakan menjadi dua (Sulistiwati, 2012) :

- a. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
- b. Upah Riil, adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

Menurut (Arsyad, 1999) mengemukakan tentang teori upah alami *natural wage*, bahwa tinggi rendahnya tingkat upah ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Biaya hidup minimum pekerja dengan keluarganya, upah ini disebut upah alamiah. Menurutny, tinggi rendahnya biaya hidup ditentukan oleh tempat, waktu dan adat istiadat penduduk.
- b. Permintaan dan penawaran kerja, ini disebut upah pasar. Menurutny tinggi rendahnya upah pasar akan bergerak di sekitar tingkat upah alamiah (*natural wage*).

Berdasarkan Kepmenakertrans no. 7 tahun 2013 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah

## Kesejahteraan

Berdasarkan Undang-undang No 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan Pasal 1 ayat 31 dinyatakan Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesejahteraan masyarakat diharapkan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan didukung oleh pemenuhan segala kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus akan menciptakan lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak dan pada tingkat upah yang mampu menyejahterakan. Fakta yang ditemui IPM (Indeks Pembangunan Manusia) secara nasional maupun provinsi masih rendah. Hal inilah yang mendasari penelitian tentang Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan masyarakat di Provinsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Salatiga, dimana pengambilan data dan pengamatan informan dilakukan dengan cara *indept-interview* serta dilakukan pengamatan selama 3 bulan. Salatiga dipilih karena mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh sektor formal. Dalam Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi kegiatan ekonomi Informan.

Setiap individu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut bisa dikarenakan oleh banyak hal, seperti tingkat sosial, *gender*, lingkungan, status perkawinan jumlah keluarga dan lain sebagainya. Namun dalam pengalihan data ini hanya melihat kebutuhan buruh sektor formal yang dipengaruhi oleh *gender*, status perkawinan dan kepemilikan anak. Faktor lain diluar *gender*, status perkawinan dan kepemilikan anak diasumsikan konstan.

Adanya komunikasi yang baik dan hubungan kekerabatan antara peneliti dengan informan memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dari informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukakan secara tidak terstruktur namun peneliti hanya mengarahkan kesub topik penelitian saja. Informan diminta bercerita bebas secara terbuka mengenai pengeluaran keseharian, yang berhubungan dengan perolehan penghasilan dan pemanfaat dari penghasilan yang diperoleh. Peneliti tidak hanya berkunjung sekali saja ke rumah Informan, hal ini dilakukan guna meperoleh kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan informan. Dengan hubungan yang baik mengakibatkan informan merasa tidak terbebani dalam menjawab pertanyaan dari peneliti dan Informan mampu bercerita apa adanya sehingga peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penulisan kertas kerja ini, peneliti menggunakan alat analisis deskriptif *explanatory*. Pertama peneliti menggambarkan bagaimana kondisi rumah tangga buruh sektor formal dengan kriteria yang dimaksud. Kedua peneliti juga

menggambarkan strategi nafkah buruh sektor formal jika pendapatan upah yang diterimanya dari tempat formal ia bekerja kurang. Terakhir peneliti menjelaskan berbagai fenomena yang diketemukan saat melakukan wawancara serta observasi di lapangan.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang dapat diperoleh dari informan adalah mereka memiliki variasi gaji, meskipun upah yang mereka peroleh sama. Upah minimum yang digunakan merupakan upah minimum kota, yang ditetapkan pemerintah kota Salatiga. Informan pertama, Mafiroh buruh perempuan lajang, Informan yang kedua, Sadi buruh laki-laki lajang, Informan ketiga Mukminin buruh laki-laki yang sudah berkeluarga dan memiliki dua anak. Informan yang terakhir, Hendri buruh perempuan yang sudah berkeluarga dengan satu anak. Upah yang diterima buruh formal dalam penelitian ini, diwakili oleh empat informan dengan tiga perusahaan berbeda dan sudah menetapkan upah minimum di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kota Salatiga. Pada saat survey dilakukan. Data survey KHL menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh buruh berada dibawah kecukupan pemenuhan komponen KHL. Tiga dari empat buruh, nominal upah yang mereka terima berada dibawah nominal pemenuhan kebutuhan berdasar KHL. Selisih antara upah yang diterima dengan rata-rata pemenuhan KHL berdasar *survey* terpaut sekitar 4,8%.

### Pemenuhan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak

Komponen makanan dan minuman disusun berdasarkan hasil wawancara dari informan dan data *survey* KHL yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Salatiga. Hasil wawancara terhadap informan buruh lajang menyatakan, mereka tidak mengeluarkan pengeluaran untuk pemenuhan jenis kebutuhan yang ada dalam komponen makanan dan minuman secara penuh. Buruh lajang hanya membelanjakan 13% dari upah yang diterima untuk membeli makan besar pada saat maka siang di tempat kerjanya dengan perolehan nasi, lauk(tahu/tempe) dan sayur atau nasi dan lauk saja (daging atau ikan). Buruh lajang mengaku, dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum saat dirumah dicukupi oleh kedua orang tuanya.

*“Kebetulan saya masih tinggal dengan orang tua, sehingga banyak kebutuhan yang dicukupi orang tua, seperti makan jika di rumah, listrik, air dan yang paling penting untuk tempat tinggal, seandainya kos berapa rupiah yang harus saya keluarkan dalam setahun.” Sadi*

Periodisasi pemenuhan komponen sandang antar buruh memiliki perbedaan. Buruh lajang perempuan, memiliki periodisasi yang lebih pendek dibandingkan buruh lajang laki-laki. Buruh berkeluarga perempuan, memiliki periodisasi yang lebih pendek dalam pemenuhan sandang jika dibandingkan dengan buruh lajang laki-laki dan buruh berkeluarga laki-laki. Untuk buruh berkeluarga laki-laki, memiliki periodisasi pemenuhan kebutuhan sandang yang lebih panjang. Jika dilihat masing-masing buruh

memiliki tanggungan yang berbeda, buruh laki-laki berkeluarga memiliki tanggungan dua anak. Anak pertama buruh laki-laki, duduk dibangku sekolah dasar dan yang kedua, masih balita. Menurutnya kebutuhan anak balita lebih banyak dari anak usia sekolah. Buruh berkeluarga perempuan, hanya memiliki tanggungan satu anak sekolah yang saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Periodesasi pemenuhan kebutuhan komponen sandang buruh, ternyata dipengaruhi oleh banyaknya tanggungan buruh.

Dalam komponen perumahan, keempat informan tidak ada yang menyewa kamar untuk menampung semua kebutuhannya. Dua informan lajang, masih bertempat tinggal dengan orang tua, sedangkan dua informan yang berkeluarga memiliki rumah pribadi yang ditematinya. Biaya sewa kamar di kota Salatiga yang mampu menampung jenis KHL dengan ukuran 3X3 untuk buruh lajang seharga Rp. 175.000,00, menurut survey KHL bulan Juli. Keperluan komponen perumahan lain, terdapat beberapa keperluan buruh lajang yang masih bergantung pada orang tuannya.

Sedangkan untuk kebutuhan komponen perumahan, bagi buruh yang berkeluarga tetap dicukupinya namun dalam periodesasi yang lebih lama dari pada yang tertera dalam KHL. Hal ini dilakukan, supaya para buruh berkeluarga tetap dapat mencukupi kebutuhan yang lainnya. Mukminin dan Henri dalam pemenuhan komponen perumahan, 16 jenis kebutuhan dari 26 jenis terpenuhi dengan periodesasi yang lebih lama dari ketentuan KHL. Periodesasi yang lebih lama ini, dilakukan untuk mensiasati supaya pendapatan yang diterimanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kondisi jenis kebutuhan yang periodesasinya lebih lama ini bukan karena kualitasnya masih bagus namun, perputaran pendapatanlah yang mendasarinya. Dalam memenuhi jenis kebutuhan perumahan, Mukminin melengkapi beberapa jenis kebutuhan dengan cara kredit terlebih dahulu. Misalnya saja kursi dan *magic com*.

Dalam komponen pendidikan, terlihat secara jelas bahwa keempat informan tidak lagi menggunakan bacaan/radio sebagai sumber pendidikan. Berdasarkan wawancara lebih lanjut pada keempatnya, saat ini menggunakan media televisi kabel untuk memperoleh informasi sehingga dapat memperoleh tambahan pengetahuan. Hal ini mengindikasikan bahwa bacaan/radio perannya sudah digantikan oleh televisi kabel, sehingga bacaan/radio sudah tidak relevan lagi jika harus di masukan kedalam komponen hidup layak (KHL) untuk buruh. Secara umum, dalam pemenuhan komponen kesehatan tidak menemui masalah. Keempat informan dapat mencukupi hampir 80% jenis kebutuhan dengan baik. Buruh lajang tidak menggunakan obat anti nyamuk, karena berdasarkan pengakuan ditempatnya jarang sekali ada nyamuk. Buruh laki-laki lajang maupun berkeluarga tidak menggunakan *deodorant* karena merasa tidak membutuhkan. Dalam komponen transportasi, dari keempat informan menggunakan motor pribadi sebagai sarana transportasi. Motor pribadi dimiliki oleh para informan dengan cara mengangsurnya. Motor memiliki masa penyusutan selama delapan tahun. Dengan pertimbangan, jika menggunakan motor pribadi informan

berharap dapat menekan pengeluaran. Jika dalam perhitungan KHL, perhitungan transportasi dihitung dengan menggunakan kriteria angkutan umum selama 30 hari PP. Jika dibandingkan: pertama, menurut *survey* KHL Juli 2014 pemenuhan kebutuhan akan transportasi sebesar Rp. 150.000,00., informan pertama, Mafiroh ketempat kerjanya dalam sehari jika menggunakan angkutan umum membayar Rp. 10.000,00., total selama 30 hari menghabiskan Rp. 300.000, 00. Jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk *service* dan beli bensin, jauh lebih mahal. Jika kredit motor, bisa dimasukkan sebagai asset. Begitu pula dengan Sadi informan kedua, jika menggunakan transportasi umum dalam sehari membayar Rp. 6.000,00 PP. Pengeluaran Sadi untuk keperluan transportasi dengan menggunakan motor pribadi jauh lebih murah, hanya Rp. 50.000,00 untuk bensin dan *service*. Keperluan angsuran motor bisa dimasukkan kedalam asset pribadi. Sama halnya dengan informan ketiga, Mukminin dalam sebulan jika menggunakan angkutan umum sebesar Rp. 120.000, 00 dengan rincian Rp. 4.000, 00 PP. Tidak beda dengan informan keempat, jika menggunakan transportasi umum dalam sebulan menghabiskan Rp. 300.000,00. Ini membuktikan bahwa kepemilikan asset sepeda motor pribadi sangat menguntungkan dan dapat menekan pengeluaran buruh dalam pengeluaran komponen transportasi.

Pemenuhan jenis kebutuhan rekreasi, dari keempat informan memiliki variasi yang berbeda. Buruh lajang perempuan maupun laki-laki, intensitas berekreasi lebih sering dari pada buruh yang sudah berkeluarga. Jika buruh berkeluarga, intensitas pemenuhannya juga beraneka ragam. Mukminin dengan dua anak melakukan rekreasi sekali dalam dua tahun, dengan alasan penghematan pengeluaran. Lain halnya dengan Henri, yang memiliki satu anak untuk memenuhi kebutuhan rekreasi sekalian berkunjung kerumah orang tua. Dalam setahun dilakukan paling tidak sebanyak tiga kali.

*“ Saya jarang sekali ajak anak-anak dan istri ketempat rekreasi, biasanya rekreasi jika hanya ada acara-acara tertentu dari pabrik tempat bekerja atau dari sekolahan anak. Jika berangkat rekreasi pun kami tidak bisa berangkat bersama. Istri saya yang berangkat dengan anak saya atau saya dengan anak saya saja.” Mukminin*

Angka nominal pengeluaran yang sangat jauh antara hasil *survey* KHL dengan hasil wawancara terhadap informan. Dalam *survey* KHL dalam jenis kebutuhan rekreasi, hanya memasukkan unsur tiket masuk tempat wisata saja (berdasarkan pedoman *survey* KHL) tanpa mempertimbangkan biaya angkutan untuk rekreasi. Pemenuhan jenis kebutuhan menabung, tiga dari empat informan memiliki kemampuan menabung yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil *survey* KHL. Sadi memperbanyak tabungannya, bertujuan untuk membangun rumah sebelum berkeluarga. Mukminin menabung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lebaran dan biaya sekolah anaknya ditahun mendatang begitu juga dengan Henri. Dalam kasus Mukminin, terlihat bahwa ia memilih untuk menunda konsumsi untuk dinikmati dimasa yang akan datang. Dari ketiga informan yang mampu menabung, tidak

memasukkan tabungan untuk biaya berjaga-jaga, mereka menunda konsumsinya untuk ditabung dengan tujuan untuk konsumsi yang akan dinikmati pada masa yang akan datang

*“Setiap bulan saya harus mampu menyisihkan sebagian dari upah yang saya terima, rencana sebelum berkeluarga saya ingin buat rumah disamping rumah orang tua. Manusiakan tidak tau seperti apa kedepannya.” Sadi*

### Tingkat Kesejahteraan Buruh Lajang

Dari kedelapan tabel pemenuhan KHL buruh lajang, jika disajikan dalam proporsi pengeluaran riil buruh dibandingkan survey KHL sebagai berikut :

**Tabel 1. Proporsisi Pengeluaran riil buruh lajang dan survey KHL**

Komponen	Buruh perempuan lajang	Buruh laki-laki lajang	Survey KHL Juli 2014*
Makanan dan Minuman	24,9%	24,5	44,2%
Sandang	4,1 %	2,8 %	9,4%
Perumahan	2,6 %	1,9%	29,1%
Pendidikan	0,01%	0,01%	2,1%
Kesehatan	3,5 %	0,1%	4%
Transportasi	50,8 %	34,3%	12,1%
Rekreasi dan Tabungan	2,4%	23,9%	2%
Lain-lain	11,6 %	12,4%	-
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer (2020)

\* hasil Survey Dinsosnakertrans Salatiga

Kesejahteraan paling utama terlihat dari kecukupan pangan yaitu sebesar 3000 kalori per hari. Survey KHL bulan Juli 2014 secara nominal untuk pemenuhan komponen makanan dan minuman sebesar 44,2 % dari total pemenuhan KHL untuk satu individu buruh. Berdasarkan hasil wawancara kedua buruh lajang ini jarang mengkonsumsi susu dan buah. Pengeluaran untuk memenuhi komponen makanan dan minuman bagi buruh lajang lebih rendah dibandingkan dengan survey KHL. Kedua buruh lajang ini hanya sekitar 24% yang ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan makan dan minumannya. Kesejahteraan buruh dari segi sandang. Pemenuhan akan sandang oleh kedua buruh lajang memang berada dibawah prosentase pemenuhan sandang dalam KHL. Menurut para buruh lajang, pakaian yang mereka miliki masih pantas untuk dikenakan sehingga anggaran untuk pemenuhan sandang bisa untuk dialihkan kekebutuhan lainnya. Kesejahteraan selanjutnya adalah dalam hal papan atau perumahan. Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, buruh lajang masih bergantung pada orang tua. Buruh pabrik lajang belum mampu mandiri, sehingga hampir 80% kebutuhan perumahan buruh lajang masih dibantu oleh orang tuannya.

*“Saya beli sepatu atau sandal jika hanya sepatu atau sandalnya rusak dan benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau beli sepatu atau sandal*

*biasanya sekitar harga tigapuluh ribuan kemudian saya bawa ke tukang sol sepatu untuk dijahit, supaya lebih awet.” Mafiroh*

Dalam pencapaian kesejahteraan dalam hal pangan dan perumahan, buruh lajang masih banyak bergantung pada orang tua. Buruh lajang, memiliki proposisi yang lebih besar dalam komponen transportasi dan kebutuhan lain-lain. Dalam hal transportasi, buruh lajang lebih memilih kredit motor dengan harapan memiliki motor sebagai investasi. Untuk kebutuhan lain-lain, seperti *handphone*, pulsa dan televisi juga tidak bisa lepas dari kehidupan buruh dikota Salatiga saat ini sehingga buruh tidak bisa menunda pemenuhan kebutuhan tersebut.

### **Tingkat Kesejahteraan Buruh Berkeluarga**

Upah yang diterima kedua buruh berkeluarga, selalu berada dibawah nilai *Survey* KHL. Akibat dari rendahnya upah buruh, mengurangi proposisi pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang tidak bisa ditunda, hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi rumah tangga buruh yang sudah berkeluarga pada sektor formal di Kota Salatiga berada dibawah tingkat kesejahteraan. Hasil wawancara terhadap buruh laki-laki yang memiliki dua anak, pengeluaran untuk pemenuhan komponen makanan dan minuman diperoleh nominal Rp. 514.700, ditambah dengan Rp. 235.000 pengeluaran konsumsi yang dikeluarkan dipabrik dan Rp. 140.000 uang saku anak sekolah. Setiap anggota keluarga Buruh laki-laki, dalam sebulan rata-rata hanya menghabiskan Rp. 222.400,00 untuk pemenuhan kebutuhan komponen makanan dan minuman. Dibandingkan dalam *survey* KHL yang harus memenuhi 3000 kalori setiap hari, nilai tersebut lebih kecil. Hasil ini menunjukkan kesejahteraan rumah tangga buruh masih rendah.

Hendri dalam pemenuhan komponen makan dan minum, untuk keluarganya dalam satu bulan antara Rp.600.950,00., Kemudian untuk keperluan uang saku anaknya sebesar Rp. 175.000,00., sedangkan untuk keperluan konsumsi dipabrik sebesar Rp. 150.000,00. jika dijumlah kemudian dirata-rata dalam setiap bulannya anggota keluarga hendri menghabiskan rata-rata Rp.308.600,00. Hasil yang didapat hampir sama dengan keluarga Mukminin bahwa untuk keperluan pemenuhan komponen makan masih dibawah 3000 Kalori per hari. Kesejahteraan yang kedua tercermin dari kecukupan sandang. Bila melihat proposisi pengeluaran rill dan *survey* KHL, pengeluaran rill untuk pemenuhan kebutuhan sandang dibawah *survey* KHL. Secara teoritis jika kedua hal ini dibandingkan, akan menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam hal sandang masih kurang.

Berbeda keadaan dengan buruh yang belum berkeluarga. Buruh yang sudah berkeluarga, dalam pemenuhan kebutuhan perumahan harus sudah mandiri karena, mereka memiliki rumah sendiri. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilakukan buruh berkeluarga, sekitar 13-20% saja dari pendapatan. Idealnya, pengeluaran buruh untuk kebutuhan akan perumahan sebesar 29,1% dari total pengeluaran berdasarkan *survey* KHL. Selisih pengeluaran rill dan *survey* ini diakibatkan karena, buruh menambah

perodesasi penggunaan komponen perumahan dan tidak jarang mengurangi kualitasnya. Selisih antara pengeluaran riil buruh berkeluarga dan *survey* KHL ini menunjukkan rendahnya kesejahteraan buruh dalam hal pemenuhan komponen perumahan.

#### Strategi nafkah

Hasil wawancara menunjukkan, bahwa penerimaan upah buruh dari tempatnya bekerja dan upah minimum tidak pernah memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan posisi rumah tangga buruh mempengaruhi pola pengeluaran dan kebutuhan buruh sehingga, mempengaruhi strategi buruh dalam pemenuhan nafkah rumah tangganya. Oleh karenanya buruh mengambil berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

*Kalau motor ini, saya bayar nyicil setiap bulannya, namun jika kredit memang harganya lebih mahal jadi terkadang untuk pemenuhan barang lain yang harganya mahal saya menabung dulu. Setelah terkumpul saya baru membeli barang yang saya butuhkan, seperti televisi ini. Terkadang saya juga pinjam uang teman saya, tapi kalo memang tidak ada pilihan lain.” Sadi*

Strategi nafkah yang digunakan antara buruh lajang perempuan dan buruh lajang laki-laki berbeda. Buruh lajang perempuan menggunakan 4 strategi yaitu : Pinjam teman / kerabat, mengurangi porsi kebutuhan lain, kredit, mencari penghasilan tambahan, sedangkan buruh lajang laki-laki hanya menggunakan 3 strategi nafkah dalam pemenuhan kebutuhannya yaitu : Kredit, menabung terlebih dahulu., pinjam teman/kerabat.

*“Terkadang upah yang saya terima, tidak sampai tanggal gajian bulan berikutnya sudah habis, yang paling penting ketika menerima gaji adalah bayar cicilan motor dan kredit baju kalau ada. Setiap bulannya saya juga ada tambahan pendapatan dari mayet baju. Jika dari hasil mayet baju juga tidak cukup, hal yang saya lakukan supaya cukup sampai gajian selanjutnya, saya biasanya memilih untuk tidak membeli makan dan jajan ditempat kerja terkadang juga bawa bekal dari rumah. Namun ketika ada kebutuhan yang harus dibayar saya pinjam keteman atau kerabat.” Mafiroh*

Buruh berkeluarga, menggunakan strategi nafkah yang lebih banyak dibandingkan dengan buruh lajang. Buruh berkeluarga laki-laki menggunakan 5 strategi yaitu: kredit, mencari usaha sampingan, menggabungkan pendapatan dengan anggota keluarga lain, mengurangi porsi kebutuhan lain, menambah perodesasi penggunaan. Berbeda dengan buruh berkeluarga perempuan yang memiliki 6 strategi yaitu : pinjam kerabat, mengurangi porsi kebutuhan lain, kredit, menambah perodesasi penggunaan, menggabungkan pendapatan dengan anggota keluarga lain, menabung terlebih dahulu (jimpitan).

*“ Dulu ketika saya dan istri masih belum memiliki usaha sampingan, terkadang upah kami berdua masih kurang untuk mencukupi semua*

*kebutuhan. Setelah kami punya anak lagi kami berdua mencoba mencari barang-barang yang tetangga dan teman-teman butuhkan dan kami jual kembali dari situlah kami memperoleh tambahan uang. Kalau saya sendiri jika membeli prabot rumah tangga yang harganya diatas satujutaan biasanya kredit dan kami cicil tiap bulannya, nah supaya dapat cukup, saya dan istri biasanya membeli barang yang memang benar-benar dibutuhkan dan menggantinya jika memang sudah tidak dapat digunakan lagi. Selain itu untuk menghindari hutang yang terlalu banyak kami juga jarang membeli lauk seperti daging, biasanya beli sebulan sekali atau dua kali.” Mukmini*

Strategi nafkah dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan dan melakukan beraneka ragam kegiatan yang bisa mendatangkan uang (kerjaan sambilan). Melakukan pekerjaan sambilan yang dapat mendatangkan upah, tentunya harus memiliki modal

*“Kebutuhan anak sekolah tidak bisa untuk ditunda, harus ada ketika anak meminta, apalagi ketika kenaikan kelas atau kelulusan banyak yang dibutuhkan. Kalau tidak menabung dulu nanti kami kebingungan memenuhinya. Biasanya kami menabung setiap bulan dan kami ambil setiap tahun ketika kenaikan kelas supaya kebutuhan anak dalam pendidikan terpenuhi ya semacam seperti jimpitan makanan untuk lebaran.” Henri*

Terdapat hal baru dalam strategi nafkah yang digunakan buruh, yaitu menabung dahulu atau istilahnya “jimpitan” dan menambah periodisasi penggunaan barang-barang kebutuhan jangka panjang seperti halnya dalam pemenuhan komponen perumahan. Biasanya, tabungan diambil setahun sekali menjelang hari raya, sehingga buruh dapat mencukupi kebutuhan hari rayanya atau kebutuhan anak masuk sekolah di awal tahun ajaran baru. Proses menabung dahulu, sebenarnya buruh sedang melakukan penundaan konsumsi untuk dinikmati dimasa yang akan datang (hari raya). Menambah periodisasi waktu penggunaan barang-barang dalam komponen perumahan digunakan oleh buruh yang berkeluarga, strategi ini buruh gunakan untuk menunda pengeluaran supaya upah dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Adapun matrik yang dapat disusun berdasarkan hasil wawancara dan analisa adalah dibawah ini.

### Matrix 1 Strategi Nafkah

	Lajang	Berkeluarga
Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjam teman/krabat</li> <li>• Mengurangi porsi kebutuhan lain</li> <li>• Kredit</li> <li>• Mencari penghasilan tambahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjam kerabat</li> <li>• Mengurangi porsi kebutuhan lain</li> <li>• Kredit</li> <li>• Menambah perodesai penggunaan</li> <li>• Menggabungkan pendapatan dengan anggota keluarga lain</li> <li>• Menabung terlebih dahulu (jimpitan)</li> </ul>
Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit</li> <li>• Menabung terlebih dahulu.</li> <li>• Pinjam teman/kerabat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit</li> <li>• Mencari usaha sampingan</li> <li>• Menggabungkan pendapatan dengan anggota keluarga lain</li> <li>• Mengurangi porsi kebutuhan lain.</li> <li>• Menambah perodesai penggunaan</li> </ul>

Sumber : Data Primer (2020)

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, mendapat dukungan dari hasil penelitian sebelumnya bahwa penerimaan upah buruh sektor formal masih dibawah pemenuhan komponen kebutuhan hidup layak yang seharusnya. Kesejahteraan buruh sektor formal di Salatiga masih rendah, terlihat dari proposisi pemenuhan kebutuhannya yang dibawah *survey* KHL. Dalam pemenuhan kebutuhannya buruh lajang masih banyak bergantung dari orang tuannya, hal ini menunjukkan bahwa upah yang diterima buruh lajang belum mampu memenuhi kebutuhan per individu buruh lajang.

Terdapat beberapa pemenuhan dalam perhitungan KHL yang sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, jenis kebutuhan pendidikan saat ini, peran bacaan dan radio tergantikan oleh peran televisi. Data juga menunjukan bahwa buruh sektor formal memiliki pengeluaran wajib diluar KHL yang harus dipenuhi. Selain itu terdapat komponen lain yang seharusnya ditambahkan dalam komponen hidup layak, yaitu komponen komunikasi yang terdiri dari telefon seluler (*handphone*) dan kebutuhan akan pulsa.

Terdapat perbedaan pemenuhan kebutuhan antara buruh pada posisi lajang dan buruh pada posisi berkeluarga, sehingga terlihat tidak *fair* . Karena dalam penetapan upah melalui KHL hanya mencakup kebutuhan hidup per satuan individu buruh lajang. Sebaiknya dalam pemeberian upah bisa dilakukan dengan cara menambahkan beberapa komponen yang dirasa perlu bagi buruh yang sudah berkeluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustine, M., & Ariawan, I. G. K. (2013). Pemberlakuan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) terhadap Kesejahteraan Pekerja/Buruh. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Arsyad, Lincolin 1999. Ekonomi Pembangunan , Yogyakarta :STIE YKPN
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The effect of minimum wages on low-wage jobs. *The Quarterly Journal of Economics*, 134(3), 1405-1454.
- Jamal, S. P. A., Sulaiman, S., & Fitriyani, D. (2020). TRANSPARANSI UPAH MELALUI E-WAGE OUTSOURCING WORKERS DALAM RANGKA PENGUATAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN. *Jurnal Legislatif*, 22-36..
- Kepmenakertrans, 2012., Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Jakarta : Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kepmenakertrans, 2013., Upah Minimum, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan Kehidupan Hidup Layak
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Mărginean, S., & Chenic, A. Ş. (2013). Effects of raising minimum wage: Theory, evidence and future challenges. *Procedia Economics and Finance*, 6, 96-102.
- Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.
- Sholeh, M. (2005). Dampak Kenaikan Upah Minimum Propinsi Terhadap Kesempatan Kerja (Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2(2).
- Sulistiawati, R. (2013). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia.
- Tjandraningsih, Indrasari & Herawati, Rina, 2009., Menuju Upah layak, Jakarta: penerbit Erlangga